

02



MASA DEPAN INDONESIA DI PERSIMPANGAN PERUBAHAN

Tri Pujadi Susilo, S.E., M.M., Ak., CA.

Indonesia Emas: Peluang atau Tantangan?

Rencana Indonesia di masa depan, kurang lebih dua puluh tahun yang akan datang, bertepatan dengan seratus tahun Indonesia merdeka, adalah menjadi negara maju atau biasa diserukan sebagai Indonesia Emas 2045. Dua puluh tahun bukanlah waktu yang lama untuk membangun bangsa dan mengubah suatu negara menjadi “maju”. Jika kita masih dilingkupi dengan keterbatasan, maka tidak ada kesempatan untuk menjadi negara yang mandiri dan berdikari. Gagasan tentang Indonesia Emas bukan hanya sekadar wacana di atas kertas, tetapi sebuah cita-cita nasional yang sudah dipetakan secara serius oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Visi ini lahir dari kesadaran bahwa dunia bergerak sangat cepat. Perubahan teknologi, dinamika geopolitik, krisis iklim, hingga pola ekonomi global menuntut Indonesia untuk berbenah. Jika kita terus berjalan di tempat dan tidak melakukan perubahan apa pun, maka bersiap-siaplah untuk menjadi negara yang tertinggal dan semakin jauh dari kemajuan. Namun, jika kita mulai langkah pertama dengan hati-hati dan konsisten, mampu memanfaatkan momentum, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Bappenas telah merumuskan 4 (empat) pilar utama sebagai landasan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keempat pilar itu bukanlah sekadar jargon belaka, tetapi suatu arah kebijakan yang saling terkait. Dari Empat pilar tersebut mencakup: pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, hingga pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan (Bappenas, 2019). Keempat pilar ini telah disesuaikan dengan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia dua puluh tahun mendatang.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam unggahannya *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020* menyatakan bahwa pada tahun 2045, penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 324 juta jiwa dengan 65% penduduk berada di usia produktif (15-64 tahun) (BPS, 2023). Kondisi ini disebut sebagai bonus demografi. Artinya, Indonesia memiliki banyak tenaga kerja produktif, sementara jumlah penduduk yang ditanggung (anak-anak dan lansia) relatif lebih kecil. Secara teori, kondisi ini adalah sebuah peluang luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Visi Indonesia Emas juga tercermin dalam target ekonomi. Data proyeksi menunjukkan, pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai sekitar USD 23.199 pada tahun 2045. Angka yang cukup fantastis, karena menunjukkan lompatan signifikan dari kondisi saat ini. Tahun 2023 pendapat per kapita kita tercatat sekitar USD 4.580 (World Bank, 2024). Sedangkan tahun 2025 diprediksi mencapai angka USD 6.305. Artinya, pendapatan di tahun 2045 naik empat kali lipatnya dalam dua dekade mendatang.

Kenaikan ini memberi harapan untuk Indonesia agar keluar dari status negara berkembang dan masuk dalam kategori negara maju.

Perlu diingat bahwa bonus demografi bukan satu-satunya jaminan otomatis untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Ini hanya akan menjadi anugerah tanpa arti, apabila tidak dibarengi dengan peningkatan elemen-elemen penting lainnya. Sebab, tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam saja, karena minyak bisa habis, tambang bisa kering, dan hutan bisa rusak. Ada empat hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari sekadar mengeksploitasi sumber daya alamnya saja, yakni membangun sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pembentukan karakter yang baik, mengatasi kesenjangan sosial dengan pemerataan pembangunan, mendorong riset dan teknologi agar lebih bermanfaat, serta menjaga persatuan dan integrasi sosial sebagai kekuatan bangsa.

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius. Masih banyak anak usia sekolah yang harus putus sekolah, bahkan ada yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal. Faktor penyebabnya pun beragam, mulai dari keterbatasan biaya, akses pendidikan yang sulit dijangkau, hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Tidak bisa dipungkiri, sebagian masyarakat masih menganggap pendidikan bukan sebagai kebutuhan primer atau penentu masa depan. Padahal, pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk mengubah cara pandang, pola pikir, dan sikap seseorang.

Saat ini, tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia masih relatif rendah. Mayoritas lulusannya hanya sampai jenjang SMA, sementara partisipasi di pendidikan tinggi masih sangat terbatas, terutama di wilayah-wilayah luar Jawa dan daerah terpencil (World Bank, 2021). Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam mencetak angkatan kerja yang kompetitif di era global. Jika pendidikan rendah, keterampilan tidak memadai, atau kesehatan masyarakat buruk, maka bonus itu justru berubah menjadi beban negara. Angka kriminalitas meningkat dan produktivitas rendah. Itulah sebabnya investasi terbesar saat ini seharusnya bukan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan manusianya.

Diharapkan, dua dekade mendatang, akan semakin banyak tenaga kerja yang menempuh pendidikan tinggi, sehingga memiliki daya saing tinggi dan mampu berkontribusi pada pembangunan berbasis pengetahuan dan teknologi. Angkatan kerja idealnya tidak lagi didominasi sektor informal, melainkan bergerak di sektor formal yang lebih produktif dan terstruktur. Selain itu, akses pendidikan yang merata hingga ke pelosok negeri menjadi kunci agar seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi masa depan bangsa.

Selain berbekal ilmu pengetahuan dan keterampilan, harus diimbangi pula dengan pendidikan mental dan pembentukan karakter. Orang pintar saja tidak cukup, karena kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan dari

kecerdasan intelektualnya saja, tetapi juga dilihat dari kualitas moral dan etika yang dimiliki setiap individu. Dengan penguatan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial tersebut dapat membawa Indonesia melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi berkarakter kuat.

Selain dari segi pendidikan, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan sosial dan pemerataan. Saat ini masih ada disparitas yang besar antara kaya dan miskin antarwilayah. Misalnya di Jakarta, segelintir orang bisa memiliki aset hingga triliun rupiah, sementara masih banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer (pangan, sandang, papan) mereka. Ketimpangan ini menghambat pembangunan inklusif. Maka, pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan menjadi agenda utama dari visi Indonesia Emas, agar seluruh rakyat dapat merasakan manfaat dari pembangunan, sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Kemajuan bangsa juga ditentukan oleh penguasaan riset dan teknologi. Ironisnya, banyak hasil riset perguruan tinggi hanya berhenti di rak perpustakaan, tidak bersambung dengan industri dan kebutuhan masyarakat. Apabila riset diterjemahkan menjadi inovasi yang nyata, maka Indonesia bisa bersaing di ranah global. Untuk itu, keterhubungan antara perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan pemerintah menjadi prasyarat mutlak untuk melahirkan suatu ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya yang menyimpan kekayaan luar biasa, sekaligus potensi konflik. Apabila keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, akan memunculkan gesekan sosial, bahkan separatisme, seperti yang kerap terjadi di Papua. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan integrasi nasional menjadi elemen yang krusial. Dengan menumbuhkan toleransi, rasa kebangsaan, dan solidaritas sosial, keberagaman dapat diolah dan menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa.

Indonesia Emas 2045 bisa tercapai meski membutuhkan kerja keras. Faktor pendukung utamanya ada empat. Pertama, bonus demografi jika dikelola dengan baik, komposisi usia produktif yang besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, sumber daya alam yang sangat kaya, baik dari tanah yang subur, hutannya yang rimbun, atau tambangnya yang melimpah. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan rata-rata 5% per tahun dalam beberapa tahun terakhir, cukup baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Keempat, pasar domestik yang besar akan menjadi modal utama, karena Indonesia di tahun 2045 diproyeksikan akan memiliki 324 juta jiwa, jika konsumsi dan daya beli masyarakat meningkat, maka akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar.

Mengurai Ketimpangan dan Membaca Peluang

Belakangan ini, kita disuguhkan dengan berbagai macam kasus di Indonesia. Akar masalahnya tidak jarang bermula dari kecemburuan sosial, yang kemudian berkembang menjadi sebuah aksi protes, bahkan pemberontakan sebagai bentuk tuntutan rakyat terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi pemerintah. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 diperlukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Indonesia masih berkecimpung dengan masalah ekonomi, korupsi, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga masalah itu ini menjadi tantangan yang harus ditaklukkan untuk menuju Indonesia Emas. Jika kita tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah ini itu, bagaimana Indonesia akan disebut negara maju? Sedangkan negara maju adalah negara berpendapatan tinggi, dengan kesejahteraan rakyatnya. Itulah harapan dan cita-cita luhur bangsa yang harus kita wujudkan bersama.

Kesenjangan ekonomi masih menjadi potret nyata di kota-kota besar Indonesia. Jakarta, misalnya, memperlihatkan kontras yang begitu mencolok. Di satu sisi, berdiri megah gedung-gedung pencakar langit yang melambangkan kemajuan ekonomi. Namun, hanya beberapa langkah dari sana, masih ada gang-gang sempit dan kumuh, tempat ratusan keluarga bertahan hidup dalam kemiskinan. Perbedaan kelas sosial terlihat begitu tajam. Ada segelintir orang yang menguasai aset triliunan rupiah, sementara di sisi lain, jutaan rakyat masih bergantung pada bansos untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakadilan ini bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kesempatan hidup yang layak.

Selain di kota-kota besar, kesenjangan antarwilayah masih begitu nyata. Semakin jauh kita melangkah ke timur Indonesia—Papua, NTT, atau Maluku—semakin terasa ketertinggalannya jika dibandingkan dengan wilayah Jawa yang sejak lama dekat dengan pusat pemerintahan dan pembangunan. Di daerah-daerah tersebut, infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, internet, hingga fasilitas kesehatan masih sangat jauh dari kata memadai. Akses pendidikan pun terbatas, sehingga banyak anak-anak yang tidak bisa merasakan bangku sekolah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akibatnya, peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi sangat kecil.

Kondisi ini tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi berpotensi memicu rasa ketidakadilan sosial. Jika dibiarkan berlarut, ketimpangan wilayah ini bisa menggerus rasa persatuan dan memperbesar risiko konflik. Padahal, semangat Indonesia Emas 2045 menuntut seluruh wilayah untuk maju bersama, bukan hanya Jawa atau kota-kota besar lainnya. Dengan membuka akses yang setara, membangun infrastruktur, serta memberikan ruang bagi generasi muda di seluruh pelosok negeri untuk berkembang, Indonesia sedang menyiapkan tulang punggung bangsa di tahun 2045. Generasi inilah yang akan menentukan apakah

Indonesia benar-benar mampu berdiri sejajar dengan negara maju, atau justru terjebak dalam lingkaran ketimpangan yang berkepanjangan.

Meski demikian, langkah positif juga sedang ditempuh oleh pemerintah dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, misalnya, bukan hanya proyek fisik semata, tetapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan dan penguatan integrasi bangsa. Dengan memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jawa, Indonesia tengah berupaya mengurangi ketimpangan antarwilayah yang terjadi selama ini.

Jika kesenjangan ekonomi berpotensi untuk merusak rasa keadilan, maka korupsi adalah akar penyakit yang memperparah keadaan. Korupsi di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah, merambah hampir semua sektor. Fenomena yang terjadi kian meresahkan, karena korupsi bukan lagi persoalan individu, tetapi melibatkan unit kerja, antar individu, bahkan antar lembaga. Lebih ironis lagi, banyak pelaku korupsi mendapat remisi dan keringanan hukuman, yang mencederai rasa keadilan rakyat. Beberapa putusan dinilai tidak sensitif, bahkan dianggap mudah dibeli oleh koruptor.

Kasus besar, seperti korupsi timah bernilai ratusan triliun rupiah berakhir dengan vonis ringan, menjadi salah satu contoh nyata lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Lebih memilukan lagi, setelah menjalani masa tahanan, para koruptor tidak benar-benar dimiskinkan, bahkan masih bisa aktif kembali di pemerintah atau legislatif, seakan-akan korupsi bukanlah sebuah dosa besar yang merugikan bangsa. Beberapa pengamat menyatakan bahwa korupsi adalah penyakit yang paling merusak. Selain menggerogoti keuangan negara, tindakan itu juga menghancurkan mental rakyat, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan merusak sistem sosial-ekonomi secara menyeluruh.

Selain masalah kesenjangan ekonomi dan korupsi, bangsa ini juga dihadapkan suatu persoalan yang tak kalah serius, yaitu bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku bangsa. Keberagaman ini adalah kekayaan sekaligus menjadi sumber kerawanan sosial bila tidak dikelola dengan bijak. Sejarah menunjukkan bahwa perbedaan identitas kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah, memicu konflik, bahkan mendorong sentimen separatisme. Jika kondisi ini dibiarkan, maka rasa persatuan dan keutuhan bangsa bisa terkikis sedikit demi sedikit.

Pertanyaannya, apakah Indonesia masih bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan ketiga masalah tersebut? Jawabannya, masih bisa. Caranya, Indonesia harus mulai berani untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, mengoptimalkan pasar domestik, dan meningkatkan kemandirian industri.

Selama ini, Indonesia masih mengekspor bahan mentahnya tanpa mengubahnya menjadi produk bernilai tinggi, sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari bahan tersebut dinikmati oleh negara lain. Kita ambil contoh di tahun 1980-an, Indonesia mengekspor kayu bulat (gelondongan) dari Kalimantan ke Korea dan Jepang. Seharusnya, kita dapat mengolah kayu tersebut menjadi kayu lapis atau furnitur, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hal serupa juga berlaku untuk hasil perkebunan, mulai dari kelapa sawit, kopi, hingga komoditas lain. Mulai saat ini, seharusnya kita menanamkan prinsip utama adalah menaikkan nilai tambah produk dalam negeri, bukan sekadar menjual bahan mentah.

Selain itu, pasar domestik Indonesia adalah kekuatan besar yang tidak boleh diabaikan. Dengan jumlah penduduk yang telah mencapai hampir 290 juta jiwa dan diproyeksikan lebih dari 320 juta pada 2045, Indonesia memiliki pasar yang sangat luas. Jika industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ketahanan ekonomi akan semakin kuat. Contohnya, industri mobil listrik yang mulai masuk ke Indonesia, bukan semata karena kebijakan pemerintah, melainkan juga karena daya beli dan potensi pasar yang tinggi.

Namun, agar kita tidak selalu memosisikan diri sebagai konsumen atau pihak pembeli, Indonesia harus mulai meningkatkan kemandirian industrinya. Sektor otomotif bisa menjadi contohnya. Dulu, Indonesia mengimpor kendaraan jadi dalam jumlah besar. Kemudian pemerintah mendorong industri perakitan lokal, seperti Honda dan Toyota, tetapi sayangnya *local content* masih sangatlah rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar industri otomotif dan manufaktur tidak sekadar merakit, tetapi memproduksi dengan komponen lokal lebih tinggi. Jika tidak, pasar Indonesia hanya akan terus dinikmati oleh perusahaan asing.

Tidak mudah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bangsa ini telah dihadapkan dengan banyak tantangan dan masalah besar, berupa kesenjangan ekonomi, korupsi, dan ancaman disintegrasi. Walaupun begitu banyak tantangan, Indonesia juga masih memiliki peluang yang dapat dimaksimalkan selama dua dekade ini, melalui sumber daya alamnya, penguatan pasar domestik, dan peningkatan kemandirian industri. Jika ketiga peluang itu dikelola dengan baik, maka akan membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia.

Transparansi Keuangan sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Akuntansi dan keuangan merupakan salah satu keilmuan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Selama ini, akuntansi sering kali dipandang sebatas proses pencatatan angka dan penyusunan laporan semata, padahal peranannya jauh lebih luas dari kelihatannya. Akuntansi bisa juga disebut sebagai bahasa bisnis yang berfungsi sebagai sarana

untuk mengomunikasikan kondisi keuangan dan prospek usaha kepada manajemen, pemilik modal, investor, pemerintah, hingga masyarakat. Dengan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, berbagai pihak dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak dan efektif.

Dalam konteks dunia usaha dan industri, akuntansi menjadi pilar utama dalam setiap tahapan siklus bisnis, mulai dari pendirian, operasional, pengembangan, hingga likuidasi. Contohnya, ketika perusahaan berencana untuk mengembangkan produk baru, analisis akuntansi dapat menghitung biaya produksi, potensi pendapatan, hingga proyeksi keuntungan jangka panjang, sehingga perusahaan dapat memutuskan apakah produk baru tersebut layak atau tidak. Demikian pula ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi usaha, akuntansi berperan untuk memetakan risiko dan peluang secara kuantitatif. Dengan dasar analisis finansial yang kuat, perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat, meminimalisasi kerugian, dan memaksimalkan potensi pertumbuhan.

Lebih jauh, akuntansi juga berperan dalam tata kelola dan pengendalian perusahaan. Dengan sistem akuntansi yang baik, perusahaan dapat memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan sesuai tujuan. Transparansi yang terjaga di dalamnya, mampu memperkuat praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam jangka panjang, hal ini bukan hanya melindungi perusahaan dari risiko penyalahgunaan dan *fraud*, tetapi juga menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas dalam dunia usaha Indonesia.

Dari perspektif pembangunan nasional, akuntansi memiliki peran vital dalam menarik dan menjaga kepercayaan para investor. Laporan keuangan yang kredibel dan transparan adalah salah satu pertimbangan utama bagi investor, domestik maupun asing, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan arus investasi yang sehat, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, maupun dalam pengembangan teknologi bisa lebih cepat terwujud. Artinya, bidang akuntansi secara tidak langsung berkontribusi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tidak hanya itu, keilmuan akuntansi juga ikut berkontribusi pada penguatan sektor publik. Pemerintah sebagai pengelola negara juga membutuhkan sistem akuntansi yang andal untuk mengatur keuangan negara. Apabila sektor publik bisa mengelola keuangan secara transparan, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Keadaan ini menjadi modal penting bagi terwujudnya Indonesia yang stabil dan maju.

Dalam sebuah penelitian yang pernah saya lakukan dengan salah satu rekan saya, ibu Hermiyetti, sekitar lima atau enam tahun yang lalu, mengenai efektivitas program **Satu Desa Satu Miliar**. Saat itu, pemerintah Indonesia menggulirkan program ambisius, bertujuan mempercepat pembangunan desa melalui kucuran dana hingga Rp1 miliar per desa, tiap tahun. Program ini menysasar lebih dari 60.000 desa di seluruh Indonesia dan diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan dari tingkat akar rumput.

Penelitian di Sulawesi Barat tersebut didanai melalui hibah riset Dikti dan terfokus untuk menggali: sejauh mana dana desa benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diharapkan. Riset ini tidak hanya berhenti pada tatanan teoretis, tetapi juga mengamati langsung praktik pengelolaan dana yang ada di lapangan.

Hasil penelitian yang kami lakukan mengungkap sejumlah temuan penting. Salah satunya adalah kenyataan bahwa banyak alokasi dana desa tidak digunakan sebagaimana mestinya. Masih sering terjadi penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga tujuan utama program untuk memperkuat pembangunan desa menjadi tidak optimal. Dalam beberapa kasus, dana tidak diarahkan pada kegiatan produktif yang mendukung pembangunan, melainkan digunakan untuk kegiatan administratif atau bahkan rawan disalahgunakan.

Berdasarkan temuan itu, kami merekomendasikan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas keuangan yang lebih ketat dalam penyaluran dana desa. Tanpa kontrol yang baik, potensi kebocoran dan penyalahgunaan akan tetap tinggi, dan manfaat bagi masyarakat tidak pernah maksimal.

Dengan berbagai kontribusi tersebut, jelas bahwa akuntansi bukanlah bidang teknis yang berdiri sendiri, melainkan instrumen pembangunan yang menyentuh banyak aspek kehidupan. Mulai dari mendukung tumbuhnya dunia usaha, memperkuat tata kelola perusahaan, menarik investasi, mendukung transparansi keuangan negara, hingga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Semua itu menjadikan akuntansi sebagai salah satu ilmu kunci yang akan menentukan keberhasilan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

SDM Berkualitas Kunci Mendapatkan Bonus Demografi

Bonus demografi saja tidak cukup mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, jika tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya manusianya. SDM berkualitas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, memiliki karakter kuat, dan berdaya saing. Proses ini tidak hanya berhenti di ruangan kelas saja, melainkan mencakup pembentukan kompetensi menyeluruh yang relevan dengan perkembangan zaman.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan di Indonesia mulai dari sekarang adalah internasionalisasi pendidikan, di mana pelajar didorong untuk mengikuti program *student mobility* atau *double degree* ke luar negeri. Tujuannya, agar mereka mendapat pengakuan internasional, memahami standar global, serta memiliki jaringan dan perspektif internasional. Cara ini sangat efektif agar mereka siap menghadapi persaingan global dan membawa pengetahuan baru ke tanah air. Strategi

ini sekaligus membangun kepercayaan diri generasi muda Indonesia dalam berkiprah di tingkat dunia.

Selain itu, perlunya keseimbangan antara teori dan praktik. Pendidikan tidak boleh berhenti pada tatanan konsep atau teori saja di dalam kelas, tanpa memahami dunia kerja secara nyata. Untuk itu, mahasiswa harus melalui proses magang agar terbiasa dengan realistik dunia kerja. Oleh sebab itu, kampus memiliki peran sebagai jembatan yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri, memastikan bahwa proses belajar tidak hanya berputar-putar di ruang kelas semata. Dengan strategi ini, lulusan perguruan tinggi dapat lebih adaptif dan solutif terhadap dunia kerja.

Selanjutnya, penguatan kemitraan dengan dunia industri, diwujudkan dengan kerja sama antara universitas dengan ratusan perusahaan untuk memastikan kurikulum selaras dengan dinamika pasar kerja. Di Indonesia sendiri memiliki cukup banyak bidang pekerjaan yang relevan dengan program studi yang ada di perguruan tinggi, tentunya setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk magang atau melakukan latihan kerja di perusahaan tersebut. Sinergi antara universitas dan industri akan mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi berkompotensi yang diakui dan dibutuhkan dalam dunia kerja.

Sebagai seorang pendidik, saya menekankan bahwa suatu kompetensi lulusan harus melampaui sekadar ijazah. Ijazah hanya sekadar pintu masuk, sedangkan persaingan sesungguhnya dimulai oleh penguasaan keilmuan, keterampilan praktik, dan kemampuan memecahkan masalah. Oleh sebab itu, *soft skill* seperti komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan etika profesional menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Penguatan karakter dan budi pekerja juga menjadi fondasi penting agar lulusan memiliki suatu integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Terakhir, dunia pendidikan didorong untuk dapat mencetak lulusan yang bukan hanya berfungsi sebagai pencari kerja, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Semangat kewirausahaan perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda bermental inovatif dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kombinasi antara kecerdasan akademik, keterampilan praktis, karakter kuat, *soft skill*, dan jiwa wirausaha, Indonesia dapat melahirkan generasi emas yang siap membawa bangsa ini menjadi pemain penting di tingkat global.

Transformasi Pemimpin Berkarakter Lokal Kualitas Global

Dalam menghadapi masa depan bangsa, saya ingin sedikit menyampaikan pesan sederhana yang saya tuju kepada siapa pun pemimpin bangsa saat ini atau nanti di masa depan, yaitu: jujur, amanah, dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Menurut saya pribadi, kepemimpinan bukanlah posisi untuk memperkaya dirinya sendiri, melainkan amanah besar untuk menyejahterakan rakyatnya. Seorang

pemimpin sejati, harus memahami bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan akan berdampak luas terhadap kehidupan jutaan orang. Oleh karena itu, kejujuran dan integritas merupakan fondasi utama yang tidak boleh ditawar.

Beberapa bulan belakangan, kita disuguhkan dengan berita koruptor yang merajalela. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin mulai terjerumus dalam praktik itu, bukan hanya rakyat yang dirugikan secara ekonomi, tetapi juga kepercayaan publik menjadi runtuh. Padahal, kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pembangunan. Kepemimpinan yang bersih dan memiliki integritas akan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah di masa depan demi menyambut Indonesia Emas 2045, Indonesia juga perlu bersikap terbuka untuk belajar dari pengalaman pembangunan negara lain, terutama negara-negara yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang mirip. Salah satu contohnya adalah negara Malaysia, negara tetangga yang dalam beberapa dekade terakhir mengalami lompatan signifikan dalam bidang pendidikan, riset, dan pembangunan sumber daya manusia.

Menurut pengalaman saya saat bertandang ke Malaysia dan bertemu dengan salah satu dosen yang berasal dari Indonesia yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB). Beliau sudah mengabdikan diri sebagai seorang pengajar sejak tahun 1977 di Malaysia. Pada masa itu, Malaysia banyak belajar melalui tenaga pendidik Indonesia untuk memperkuat fondasi pendidikan tinggi mereka. Namun, kini situasinya berbalik: banyak pelajar Indonesia justru menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Fenomena inilah yang mengindikasikan bahwa Malaysia telah berhasil membangun sistem pendidikan dan riset yang jauh lebih maju dan terstruktur, bahkan mampu melampaui Indonesia.

Keberhasilan Malaysia membangun sektor pendidikan itu, tidak terjadi dalam semalam. Mereka melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pendidikan tinggi, mulai dari peningkatan mutu dan kualitas perguruan tinggi, penguatan peran lembaga riset, serta adanya pembiayaan dalam inovasi. Selain itu, Malaysia juga menerapkan kebijakan afirmatif untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia lokal, memastikan bahwa masyarakat lokal memperoleh akses luas terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang layak. Strategi ini membantu Malaysia mencetak lebih banyak tenaga profesional dan akademisi berkualitas, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

Faktor terpenting yang membuat model pembangunan ini relevan dengan negara kita adalah kesamaan kultur maupun kondisi sosialnya, sehingga relevan untuk diterapkan dibandingkan meniru negara-negara yang konteksnya berbeda, seperti Amerika Serikat dan negara-negara

Eropa Barat. Malaysia mampu menghubungkan hasil riset kampus dengan kebutuhan industri dan pemerintah. Inilah yang sempat saya tekankan di bagian sebelumnya, bahwa perlunya keberlanjutan riset untuk dikembangkan lebih lanjut dalam dunia industri agar tidak sia-sia.

Selain Malaysia, Jerman juga negara yang patut dijadikan inspirasi, terutama dalam sektor industri, teknologi, dan pendidikan vokasi. Modal *dual system* yang mereka terapkan, menggabungkan pendidikan dengan teori di sekolah dengan praktik kerja di industri atau perusahaan, telah melahirkan tenaga kerja yang sangat terampil dan siap pakai. Keberhasilan Jerman dalam menjaga daya saing industri manufaktur dan teknologi tinggi tidak lepas dari sikap yang disiplin, budaya kerja yang kuat, serta dukungan pemerintah untuk terus berinovasi dan melakukan pelatihan kerja. Bagi Indonesia, model Jerman sangat relevan untuk memperkuat sektor industri dan menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif secara global.

Meskipun demikian, Indonesia tidak boleh hanya menyalin mentah-mentah model pembangunan dari negara lain, melainkan harus melakukan adaptasi konseptual. Pengalaman Malaysia dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat pendidikan tinggi maupun pembangunan sumber daya manusia, sedangkan model Jerman bisa menjadi inspirasi dalam pengembangan teknologi, vokasi, maupun industri berbasis keterampilan. Dengan menggabungkan keduanya, Indonesia dapat membentuk strategi pembangunan menyeluruh: membangun manusia yang cerdas dan berkarakter, memperkuat fondasi industri, dan menciptakan ekosistem inovasi berkelanjutan.

Melihat dari berbagai tantangan dan peluang yang telah kita bahas sebelumnya, mulai dari memaksimalkan bonus demografi, hingga penguatan dalam sektor ekonomi dan teknologi berkaca dari negara lain, terlihat jelas bahwa Indonesia tengah berada pada titik krusial dalam perjalanannya menuju Indonesia Emas 2045. Semua dinamika menunjukkan bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau infrastruktur semata, tetapi juga oleh sejauh mana bangsa ini mampu mempersiapkan sumber daya manusianya untuk naik ke level yang lebih tinggi.

Harapan besar dan visi saya untuk Indonesia di tahun 2045, yang bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia, saya sempat membayangkan negara ini menjadi negara yang benar-benar adil, makmur, dan mandiri. Rakyat dapat hidup dalam lingkungan yang damai, penuh kebersamaan, dan merasakan keadilan sosial secara nyata. Indonesia di masa depan harus berdiri tegak sebagai bangsa yang tidak lagi bergantung pada negara lain, baik di bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan, tetapi mampu menentukan arah langkahnya sendiri.

Selain itu, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan penguasaan teknologi yang kuat, Indonesia memiliki modal besar untuk bersaing di tingkat global. Teknologi bukan hanya sekadar alat, tetapi sebuah jembatan menuju kemandirian industri, efisiensi ekonomi, dan daya saing internasional. Di saat yang sama, seluruh kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu pendidikan. Hanya dengan rakyat yang terdidik dan berpikiran kritis, Indonesia mampu untuk menjalankan demokrasi secara dewasa, di mana partisipasi masyarakat tidak berhenti pada pemungutan suara semata, melainkan berlanjut pada keterlibatan aktif dalam proses pembangunan dan pengawasan jalannya pemerintahan.

Sebuah masa depan Indonesia telah tergambar di depan mata kita, di mana bangsa ini tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga berdaulat, berkeadilan, dan bermartabat di mata dunia. Saya percaya jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama dengan visi yang sama, maka cita-cita luhur itu bukanlah sekadar utopia, melainkan kenyataan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras, kesungguhan, dan kejujuran.

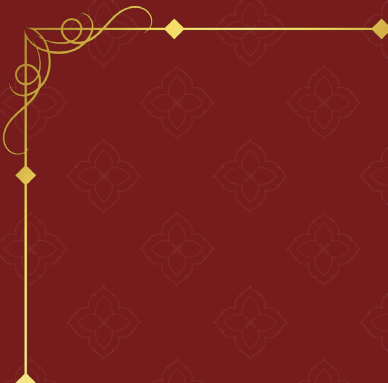
Daftar Pustaka

- Ananta, A., Utami, S., & Suryadinata, L. (2020). *Indonesia's demographic dividend: Opportunities and challenges*. ISEAS Publishing.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Proyeksi penduduk Indonesia 2020–2050 hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023, 16 Mei). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020* (No. 04100.2304). <https://www.bps.go.id/publication/2023/05/16/fad83131cd3b-9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-peduduk-2020.html>
- Ball, R. (2006). International financial reporting standards (IFRS): Pros and cons for investors. *Accounting and Business Research*, 36(supl), 5–27. <https://doi.org/10.1080/00014788.2006.9730040>
- Bappenas. (–). *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses dari https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf
- Bappenas. (2019). *Visi Indonesia 2045*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Barton, A. D. (2005). Professional accounting standards and the public sector—a mismatch. *Abacus*, 41(2), 138–158. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2005.00172.x>
- Belkaoui, A. R. (2004). *Accounting theory* (5th ed.). Cengage Learning.
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). (2019). *Project 2045: Executive summary*. ERIA. https://www.eria.org/uploads/media/5.Project2045_Executive_Summary.pdf
- Gray, R. (2006). Social, environmental and sustainability reporting and organisational value creation? Whose value? Whose creation? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 19(6), 793–819. <https://doi.org/10.1108/09513570610709872>
- Horngren, C. T., Sundem, G. L., & Stratton, W. O. (2005). *Introduction to management accounting* (13th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Kompas. (2023, Mei 12). Pendidikan karakter sebagai fondasi SDM Indonesia. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id>



- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). *G20/OECD principles of corporate governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- Susilo, T. P., & Sukarno, E. (2025). The state budget based on prudent affirmative action. *International Journal of Social Science and Economics Invention*, 11(7), 124-133. <https://doi.org/10.23958/ijsssei/vol11-i07/406>
- UNICEF. (2022). *Out-of-school children in Indonesia: Challenges and policy recommendations*. UNICEF Indonesia.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2018). *Financial and managerial accounting* (14th ed.). Cengage Learning.
- World Bank. (2021). *Indonesia education flagship report: Seizing the demographic dividend*. World Bank.
- World Bank. (2024). *GDP per capita (current US\$)-Indonesia*. World Bank Data. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ID>
- World Bank. (2024). *World development indicators: Indonesia data*. World Bank.





*Teknologi bukan hanya sekadar alat,
tetapi sebuah jembatan menuju
kemandirian industri, efisiensi ekonomi,
dan daya saing internasional*



